

TESIS

**URGENSI PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

SYAMSURI, S.H.

NIM. 2420215310151

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

TESIS

**URGENSI PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

SYAMSURI, S.H.

NIM. 2420215310151

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**URGENSI PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

SYAMSURI, S.H.

NIM. 2420215310151

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judu Tesis : URGENSI PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM
PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Nama : Syamsuri, S.H.

NIM : 2420215310151

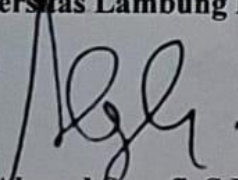
**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

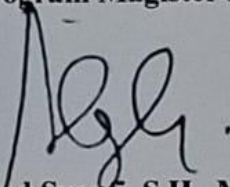
**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M..

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsuri, S.H.
NIM : 2420215310151
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

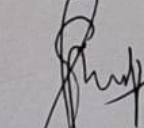
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 April 2026

Yang membuat pernyataan



Syamsuri, S.H.

NIM. 2420215310151

SYAMSURI. URGensi PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 113 Halaman.

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya melalui digitalisasi hubungan kerja. Digitalisasi ketenagakerjaan mengubah pola hubungan kerja konvensional menjadi hubungan kerja berbasis teknologi yang fleksibel, dinamis, dan sering kali tidak lagi bergantung pada interaksi fisik antara pekerja dan pengusaha. Perubahan tersebut berdampak langsung pada eksistensi dan substansi perjanjian kerja sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktiknya, perjanjian kerja digital sering disusun dalam bentuk kontrak baku elektronik yang diterima melalui persetujuan digital tanpa proses perundingan yang substansial. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, karena pekerja cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah baik secara ekonomi, struktural, maupun informasional. Ketimpangan tersebut berpotensi melahirkan ketidakadilan kontraktual serta melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja. Dalam konteks ini, asas keseimbangan menjadi prinsip fundamental yang relevan untuk memastikan bahwa perjanjian kerja tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Urgensi asas keseimbangan semakin kuat mengingat digitalisasi ketenagakerjaan juga menghadirkan fenomena pengaburan status hubungan kerja, distribusi risiko yang tidak proporsional, serta penggunaan sistem algoritmik dalam pengawasan dan penilaian kerja yang berpotensi merugikan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan urgensi asas keseimbangan dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa asas keseimbangan menjadi prinsip yang urgen dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan di Indonesia serta untuk mengkaji kedudukan asas keseimbangan sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja dalam perjanjian kerja digital. Penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi normatif mengenai bagaimana asas keseimbangan seharusnya ditempatkan sebagai prinsip fundamental dalam penyusunan, penafsiran, dan pelaksanaan perjanjian kerja di tengah transformasi digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian dengan mengintegrasikan konsep asas keseimbangan ke dalam konteks hubungan kerja digital yang terus berkembang. Penelitian ini juga diharapkan mengisi kekosongan kajian yang secara khusus menempatkan asas keseimbangan sebagai fokus utama dalam analisis perjanjian kerja digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan praktisi

ketenagakerjaan dalam merumuskan dan menafsirkan regulasi ketenagakerjaan yang responsif terhadap dinamika digitalisasi, serta tetap berorientasi pada perlindungan hukum bagi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kerja.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur perjanjian kerja dan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas keseimbangan dalam perspektif hukum perjanjian dan teori perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Pendekatan analitis digunakan untuk menilai kecukupan norma hukum dalam menjawab tantangan digitalisasi ketenagakerjaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi yuridis untuk merumuskan preskripsi hukum yang ideal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai prinsip korektif terhadap ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha yang semakin menguat akibat penggunaan kontrak baku digital, sistem algoritmik, dan mekanisme kerja fleksibel. Prinsip ini menuntut agar perjanjian kerja tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan formal, tetapi sebagai instrumen hukum yang harus mencerminkan proporsionalitas hak dan kewajiban serta distribusi risiko yang adil. Asas keseimbangan juga berfungsi sebagai landasan penafsiran dalam menilai klausul perjanjian kerja digital, terutama ketika terdapat ambiguitas atau ketentuan yang berpotensi merugikan pekerja. Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip keseimbangan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, asas keseimbangan menjadi prasyarat normatif untuk menjaga agar digitalisasi ketenagakerjaan tetap sejalan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat pekerja di Indonesia.

SYAMSURI. 2026. URGENSI PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 113 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Penerapan Asas Keseimbangan, Perjanjian Kerja, Era Digitalisasi Ketenagakerjaan

Penelitian berjudul Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja pada Era Digitalisasi Ketenagakerjaan di Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis urgensi asas keseimbangan sebagai prinsip dalam perjanjian kerja serta kedudukannya sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja pada era digitalisasi ketenagakerjaan. Penelitian ini memiliki kegunaan teoretis dalam memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian, serta kegunaan praktis sebagai rujukan bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan menjadi prinsip yang urgen dalam perjanjian kerja pada era digitalisasi karena hubungan kerja digital memperkuat ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Penggunaan kontrak baku elektronik, sistem algoritmik, dan fleksibilitas kerja berbasis platform berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual apabila tidak dibatasi oleh prinsip keseimbangan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai pembatas kebebasan berkontrak dan sebagai instrumen korektif terhadap dominasi sepihak dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kerja digital.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kedudukan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja memiliki fungsi strategis sebagai dasar perlindungan hukum bagi pekerja. Asas ini menjadi landasan penafsiran, pengendalian isi kontrak, dan evaluasi kewajaran klausul yang berpotensi merugikan pekerja. Dengan demikian, asas keseimbangan merupakan prasyarat normatif untuk memastikan bahwa digitalisasi ketenagakerjaan tetap sejalan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat pekerja di Indonesia.

SYAMSURI. 2026. THE URGENCY OF THE PRINCIPLE OF BALANCE IN EMPLOYMENT AGREEMENTS IN THE ERA OF LABOR DIGITALIZATION IN INDONESIA. Master of Laws Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 113 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Application of the Principle of Balance, Employment Agreement, Era of Labor Digitalization*

This research entitled The Urgency of the Principle of Balance in Employment Agreements in the Era of Labor Digitalization in Indonesia aims to analyze the urgency of the principle of balance as a fundamental principle in employment agreements and its position as a legal protection basis for workers in the era of labor digitalization. The study contributes theoretically to the development of labor law and contract law scholarship and practically as a reference for policymakers and law enforcers. This research employs normative legal research with a prescriptive approach using statutory, conceptual, and analytical methods.

The findings indicate that the principle of balance becomes increasingly urgent in employment agreements within the digital labor context due to the strengthening imbalance of bargaining positions between workers and employers. The use of standardized electronic contracts, algorithm-based management systems, and platform-based work flexibility potentially leads to contractual injustice if not limited by the principle of balance. This principle functions as a limitation to freedom of contract and as a corrective instrument against unilateral dominance in the formation and implementation of digital employment agreements.

The study further reveals that the position of the principle of balance in employment agreements serves as a strategic foundation for legal protection of workers. It operates as a basis for contractual interpretation, control of contract content, and evaluation of unfair clauses that may disadvantage workers. Therefore, the principle of balance constitutes a normative prerequisite to ensure that labor digitalization remains aligned with the objectives of labor law, namely justice, legal certainty, and the protection of workers' dignity in Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja pada Era Digitalisasi Ketenagakerjaan di Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan izin, dukungan akademik, serta fasilitas selama proses studi dan penyusunan tesis ini berlangsung.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membimbing dan memberikan arahan administratif dan akademik secara berkelanjutan demi kelancaran studi penulis.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen akademik telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi landasan intelektual dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi mitra diskusi, berbagi informasi, dan memberi semangat selama proses penulisan dan studi berlangsung.

6. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional dalam membantu segala keperluan akademik penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, keluarga, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, dukungan moral, serta semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan.

Banjarmasin, April 2026

Penulis,

Syamsuri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	21
G. Pertanggungan Jawaban Sistematika Penulisan	24
BAB II ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PRINSIP DALAM PERJANJIAN KERJA PADA ERA DIGITALISASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.....	27
A. Asas Keseimbangan sebagai Prinsip Fundamental dalam Perjanjian Kerja.....	27
B. Asas Keseimbangan dalam Posisi Tawar Pekerja pada Perjanjian Kerja Digital.....	47
C. Asas Keseimbangan sebagai Dasar Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja pada Era Digitalisasi.....	60

BAB III KEDUDUKAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA ERA DIGITALISASI KETENAGAKERJAAN.....	75
A. Kedudukan Asas Keseimbangan sebagai Prinsip Normatif dalam Perjanjian Kerja.....	75
B. Urgensi Asas Keseimbangan sebagai Prinsip Pembatas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Digital....	87
C. Kedudukan Asas Keseimbangan sebagai Landasan Penafsiran dalam Perjanjian Kerja Digital.....	101
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA